EVEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

ROHANA TIARA
NIM. 07011381419123

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
JULI 2018

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KOTA PALEMBANG

Skripsi

Oleh :

ROHANA TIARA
07011381419123

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, April 2018

Pembimbing I

Dr. Nengyanti, M.Hum
NIP 196704121992032002

Pembimbing II

Drs. Mardianto, M.Si
NIP 196211251989121001

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "*Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Palembang*" telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 18 Juli 2018.

Palembang, 18 Juli 2018

Ketua:

1. Dr. Nengyanti, M.Hum
NIP. 196704121992032002 .....

Anggota:

1. Drs. Mardianto, M.Si.
NIP. 196211251989121001 .....

2. Drs. Joko Siswanto, M.Si
NIP. 195706051985031003 .....

3. Dra. Martina, M.Si.
NIP. 196603051993022001 .....

Mengetahui:

Dekan FISIP

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Administrasi Negara,

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

MOTTO

"Siapapun yang menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka akan memberikan kemudahan jalannya menuju syurga."

(H.R Muslim)

"Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna. "

(Einstein)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ayahanda dan Almarhumah Ibundaku tercinta.
2. Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan.
3. Saudara-saudaraku serta keponakan-keponakan kecilku yang menjadi penyemangat dalam menjalani perjuangan ini.
4. Sahabat-sahabatku D2nayar yang telah memberi kenangan indah selama 4 tahun masa perkuliahan.
5. Almamaterku, Universitas Sriwijaya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan curahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menyusun skripsi ini dengan judul "Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Palembang. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Sarjana S-1 Jurusan Ilmu Administrasi Negaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skipsi ini, sulit bagi penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran selama proses penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri. M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya atas didikan dan arahan selama menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya atas didikan dan arahan selama menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Periode 2014-2018 atas didikan dan arahan selama menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya atas didikan dan arahan selama menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr.Andy Alfatih, MPA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya atas didikan dan arahan selama menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya atas didikan dan arahan selama menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Raniasa Putra, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Adminisrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya periode 2014-2018 atas didikan dan arahan selama menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
9. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya atas didikan dan arahan selama menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
10. Ibu Dra. Martina, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya periode 2014-2018

sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing, mengajarkan, memberi saran dan nasihat selama perkuliahan ini.

11. Ibu Dr. Nengyanti, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberi banyak masukan, arahan, serta nasihat yang sangat berguna selama menjalani penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.
12. Bapak Drs. Mardianto, M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingannya serta pemahaman dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya atas pelajaran dan ilmu yang telah diberikan.
14. Seluruh karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Kampus Palembang.
15. Tim Koordinator Kota Program Keluarga Harapan (Korkot PKH) yang telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara dengan penulis dan senantiasa membantu dalam memberikan data-data guna penyelesaian skripsi ini.
16. Pihak Dinas Sosial Kota Palembang yang telah berkenan memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi terkait data penelitian serta telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara.
17. Teristimewa kepada keluarga besarku tercinta, ayahanda yang selalu memberi support dan doa tiada henti, almarhumah ibunda tercinta, Ayunda-ayundaku yang selalu memberi dukungan dan doa, yuk ta, yuk tina, yuk vana, yuk mi, yuk pen dan adikku amin yang telah menyemangati, semoga Allah SWT senantiasa memberikan Rahmat-Nya kepada kita semua.
18. Sahabat-sahabat seperjuanganku D2nayar, Dedem, Yuwi, Yak dan Ewid yang memberikan bantuan dan pemikiran yang baik, membuat kenangan tak terlupakan, canda tawa, tangis serta segala cerita yang pernah terjadi.
19. Seluruh teman-teman satu angkatan Administrasi Negara 2014 yang telah memberikan dukungan dan semangatnya kepada penulis.
20. Semua pihak yang terlibat membantu dalam penyelesaian usulan penelitian ini, terima kasih untuk seluruh bantuannya semoga Allah SWT memberikan nikmat-Nya untuk kita semua. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya kemampuan, pengetahuan dan pengalaman penulis miliki sebagai mahasiswa. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi kita semua. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Palembang, Juli 2018

Penulis
Rohana Tiara

ABSTRACT

The problem of poverty in this country seems to be a utopian thing to be solved. Efforts continued to be done by the government through programs of poverty alleviation, which is expected to be able to empower the people on the category of the poor. The city of Palembang as the capital of South Sumatra Province is not spared from this problem of poverty.Government of Palembang city, through social service, has a program's Assistance Food Non Cash (BPNT) in Palembang city, which is one of the flagship program of the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia in terms of poverty alleviation. If BPNT be one of the flagship program that should have been able to reduce poverty every year because targets of this program underprivileged families. Research using the descriptive approach and mixed approach (mixed method), through technical documentation, observation, and interviews, as well as the spread of the questionnaire, which involves 99 respondents as samples in measuring the effectiveness of the program BPNT in the city of Palembang. Based on the results of this study indicate that the BPNT Program in Palembang City has been successfully implemented, but still not effective with an effectiveness level of 56% which refers to the Ministry of Home Affairs R & D value category in Budiani (2009), using Duncan's theory cited by Steers, namely the achievement of goals , integration and adaptation.

Keywords : Effectiveness, Program, Non-Cash Food Assistance

Advisor I	***Advisor II***
Dr. Nengyanti, M.Hum	**Drs. Mardianto, M.Si**
NIP. 196704121992032002	**NIP. 196211251989121001**

Palembang, July 2018
Chairman of the State Administration Science Departement
Faculty of Social and Political Science
Sriwijaya University

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA

NIP. 198108272009121002

ABSTRAK

Masalah kemiskinan di Indonesia seakan menjadi hal yang utopis untuk diselesaikan. Berbagai upaya pun terus dilakukan pemerintah melalui program-program pengentasan kemiskinan yang diharapkan mampu meringankan kebutuhan sehari-hari masyarakat kurang mampu. Kota Palembang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan tidak luput dari masalah kemiskinan ini. Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Sosial kemudian mempunyai Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Palembang yang merupakan salah satu program unggulan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam hal pengentasan kemiskinan. Jika BPNT menjadi salah satu program unggulan tentunya hal ini dapat membuat angka kemiskinan semakin berkurang setiap tahunnya karena sasaran dari program ini adalah keluarga yang masuk dalam kategori kurang mampu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan campuran *(Mixed Method)* melalui teknik dokumentasi, observasi, wawancara serta penyebaran kuesioner, yang melibatkan 99 orang responden sebagai sampel dalam mengukur efektivitas Program BPNT di Kota Palembang. Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program BPNT di Kota Palembang telah berhasil dijalankan, namun masih belum efektif dengan tingkat efektivitas sebesar 56% yang merujuk pada kategori nilai Litbang Depdagri dalam Budiani (2009), dengan menggunakan dari teori Duncan yang dikutip Steers, yakni pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi.

Kata Kunci : Efektivitas, Program, Bantuan Pangan Non Tunai

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Nengyanti, M.Hum	**Drs. Mardianto, M.Si**
NIP. 196704121992032002	**NIP. 196211251989121001**

Palembang, Juli 2018
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA

NIP. 198108272009121002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI ..... **iii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
ABSTRACK ..... **vii**
ABSTRAK ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**
DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN DAN LAMBANG ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori 9
B. Pengertian Efektivitas 9
C. Ukuran Efektivitas 11
D. Penelitian Terdahulu 15
E. Kerangka Teori 17
F. Kerangka Pikir 18

BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 21
B. Definisi Konsep 22
C. Fokus Penelitian 23
D. Jenis dan Sumber Data 24
E. Informan Penelitian 25
F. Teknik Pengumpulan Data 26
G. Teknik Keabsahan Data 28
H. Teknik Analisis Data 29
I. Populasi dan Sampel 30

BAB IV GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Kota Palembang 32
B. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Palembang 38
C. Gambaran Umum Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 49
D. Efektivitas Program BPNT di Kota Palembang 55
E. Ukuran Efektivitas Program BPNT di Kota Palembang 90

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 92
B. Saran 92

DAFTAR PUSTAKA 94
LAMPIRAN 96

DAFTAR TABEL

Tabel

1.1. Garis Kemiskinan Sumatera Selatan September 2015-September 2016..... 3
1.2. Penerima BPNT Kota Palembang Tahun 2017 6
2.1. Standar Pengukuran Rasio Efektivitas 15
2.2. Penelitian Terdahulu 16
3.1. Fokus Penelitian 23
4.1. Garis Kemiskinan Kota Palembang pada tahun 2015-2017..... 52
4.2. Penerima BPNT Kota Palembang tahun 2017 53
4.3. Karakeristik Responden Berdasarkan Kelurahan 56
4.4. Persiapan E-warong dalam Pelaksanaan Program BPNT 60
4.5. Proses Pendaftaran Peserta Program BPNT 62
4.6. Pemanfaatan Bantuan Pangan oleh KPM 66
4.7. Tanggapan Responden Mengenai 3 Sub Aspek Pentahapan Program 67
4.8. Kurun Waktu Penyaluran Dana Bantuan..... 69
4.9. Proses Penyeleksian Sasaran Program BPNT 73
4.10. Persentase Dimensi Pencapaian Tujuan 74
4.11. Sosialisasi Program BPNT 77
4.12. Pengembangan Konsensus Program BPNT 79
4.13. Persentase Dimensi Integrasi..... 80
4.14. Penerima BPNT Tahun 2017..... 83
4.15. Penyaluran Kartu Kombo 84
4.16. Daftar Pendamping KPM BPNT 86
4.17. Pendamping Program BPNT 88
4.18. Persentase Dimensi Adaptasi Program BPNT..... 90
4.19. Klasifikasi Skor Capaian Persentase Tertinggi Indikator tiap Dimensi 91

DAFTAR GAMBAR

Gambar

2.1. Kerangka Pemikiran 20
4.1. Sejarah Kota Palembang 33
4.2. Peta Kota Palembang 34
4.3. Dinas Sosial Kota Palembang 39
4.4. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Palembang 41
4.5. Kartu Kombo sebagai alat pembayaran elektronik BPNT 51
4.6. Alur Pemanfaatan Bantuan Pangan Non Tunai 54
4.7. Kriteria e-warong Sony Kristanto 59
4.8. Bukti Transaksi Pemanfaatan BPNT 64
4.9. Pemanfaatan atau pembelian bahan pangan oleh KPM 65
4.10. Kondisi rumah KPM yang termasuk dalam kriteria penerima BPNT 72
4.11. KPM penerima BPNT dan Kartu Kombo 72
4.12. Mesin EDC yang digunakan ketika transaksi BPNT di e-warong 82
4.13. Penyaluran BPNT di dampingi Pendamping BPNT..... 87

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Transkrip Wawancara 96
Lampiran 2. Kuesioner Penelitian 108
Lampiran 3. Surat Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi 110
Lampiran 4. Kartu Bimbingan Seminar Proposal Dosen Pembimbing I dan II 111
Lampiran 5. Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing I dan II 113
Lampiran 6. Surat Izin Penelitian 115
Lampiran 7. Surat Kanwil BRI Palembang 116
Lampiran 8. Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Sumatera Selatan 121
Lampiran 9. Landasan Hukum 128
Lampiran 10. Dokumentasi 163

DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN DAN LAMBANG

APBD	:	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
ATM	:	*Automated Teller Machine*
BAPPENAS	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BPNT	:	Bantuan Pangan Non Tunai
BPS	:	Badan Pusat Statistik
DPM	:	Daftar Penerima Manfaat
DT-PFM	:	Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin
E-WARONG	:	Elektronik Warung Gotong Royong
GK	:	Garis Kemiskinan
GKBM	:	Garis Kemiskinan Bukan Makanan
GKM	:	Garis Kemiskinan Makanan
GNNT	:	Gerakan Nasional Non Tunai
HIMBARA	:	Himpunan Bank Negara
KEMENDAGRI	:	Kementerian Dalam Negeri
KEMENKO	:	Kementerian Koordinator
KEMENSOS	:	Kementerian Sosial
KKS	:	Kartu Keluarga Sejahtera
KORKOT	:	Koordinator Kota
KPM	:	Keluarga Penerima Manfaat
KUBE	:	Kelompok Usaha Bersama
LKD	:	Layanan Keuangan Digital
MPM	:	Mekanisme Pendaftaran Mandiri
NIK	:	Nomor Induk Kependudukan
PKH	:	Program Keluarga Harapan
PMK	:	Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
RASTRA	:	Beras Sejahtera
RPK	:	Rumah Pangan Kita
RTM	:	Rumah Tangga Miskin
SNKI	:	Strategi Nasional Keuangan Inklusif
TKSK	:	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
TNP2K	:	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara dengan penduduk yang sangat banyak memerlukan peningkatan pembangunan nasional di berbagai sektor kehidupan demi terwujudnya kesejahteraan sosial. Pembangunan nasional dapat berhasil jika negara berada dalam kondisi yang stabil. Kondisi negara yang stabil dapat dilihat dari segi perekonomiannya, dalam hal ini yang terkait ialah stabilitas ekonomi yang pada dasarnya menyangkut dengan persediaan pangan masyarakat. Bahan pangan sebagai kebutuhan pokok perlu dikelola dan diawasi oleh pemerintah, sehingga krisis pangan tidak terjadi di masyarakat.

Pemerintah bertanggung jawab dalam mengelola persediaan pangan yang mencukupi, dengan kualitas yang baik dan sesuai dengan daya beli masyarakat. Keadaan masyarakat Indonesia yang menghadapi masalah kemiskinan dan kerawanan pangan, umumnya karena banyak masyarakat yang berpenghasilan rendah. Masalah ini seakan tidak pernah berhenti dan terus berkembang di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Kemiskinan tidak hanya dilihat dari tingkat pendapatan yang rendah, namun juga harus dikaitkan dengan tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Untuk meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan, dikeluarkanlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa, “Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan

masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.” Dalam rangka penanggulangan kemiskinan inilah, pemerintah merealisasikan berbagai program penanggulangan kemiskinan.

Program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah sangat beragam, mulai dari bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Program-program ini belum sepenuhnya berhasil, namun telah menunjukkan sedikit perubahan. Hal ini dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2015 yang mencapai 10.619.860 jiwa atau 8,22 persen mengalami penurunan pada September 2016 yaitu mencapai 10.485.640 jiwa atau 7,73 persen. (Sumber : www.bps.go.id). Data ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah dalam mengatasi kemiskinan telah mengalami perubahan, namun belum signifikan.

Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) juga tidak luput dari kemiskinan. Sumatera Selatan termasuk salah satu provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di pulau Sumatera. Dilansir dari laman BPS Republik Indonesia, jumlah penduduk miskin di Sumatera Selatan berada di urutan ke-4 dari 10 Provinsi di Sumatera. Besarnya jumlah penduduk miskin di Sumatera Selatan menjadi acuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan sumber daya yang ada untuk dikelola sebaik mungkin demi menuntaskan kemiskinan. Berikut garis kemiskinan Sumatera Selatan tahun 2015-2016 :

Tabel 1.1. Garis Kemiskinan Sumatera Selatan September 2015 – September 2016

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan/*Poverty Line* (Rp/Kapita/Bulan)		
	Makanan / *Food*	Bukan Makanan/ *Non Food*	Jumlah/ *Amount*
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan			
September 2015	272.915	105.823	378.739
September 2016	283.334	116.824	400.159
Pedesaan			
September 2015	254.209	65.785	319.994
September 2016	270.182	69.692	339.874

Sumber : www.sumsel.bps.go.id dalam Berita Resmi Statistik Provinsi Sumatera Selatan No.05/01/16 Th. XIX

Berdasarkan tabel 1.1. diketahui bahwa tingkat kemiskinan masyarakat kota lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat desa, hal ini umumnya terjadi karena beban hidup dan biaya hidup di kota lebih tinggi daripada di desa. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada September 2016 sebesar 76,04 persen.

Berbagai program dan upaya pengentasan kemiskinan yang telah terlaksana di Sumatera Selatan tepatnya di Kota Palembang, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat menyediakan persediaan pangan untuk masyarakat kurang mampu. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi program penting dalam upaya mereformasi Program Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) yang dilaksanakan berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program, serta untuk mendorong inklusi keuangan.

Dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, yang menjelaskan bahwa dalam rangka stabilitas ekonomi nasional, meningkatkan ketepatan kelompok sasaran penerima manfaat, memberikan nutrisi yang lebih seimbang, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada rakyat miskin, mendorong usaha eceran rakyat, serta memberikan akses jasa keuangan pada rakyat miskin dan mengefektifkan anggaran, dipandang perlu melaksanakan program pembaharuan Rastra. Berdasarkan hal tersebut, Presiden memberikan arahan reformasi Progam Rastra menjadi bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai atau disebut juga dengan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

BPNT adalah bantuan dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya dan melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di Elektronik Warung Gotong Royong Bantuan Pangan Non Tunai (E-warong BPNT) atau disebut juga dengan Agen BRIlink. Program BPNT sendiri merupakan reformasi Program Subsidi Rastra, dengan perubahan dari bantuan pola subsidi menjadi bantuan sosial (pangan). (Pedoman Umum BPNT, Tahun 2016)

Program BPNT bertujuan untuk mengurangi beban pengaluaran masyarakat kurang mampu melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi KPM, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Dalam proses penyalurannya, penerima manfaat akan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Kartu Kombo yang didalamnya terdapat saldo sebesar Rp 110.000,- yang diberikan setiap bulan. KKS yang dimodifikasi menjadi kartu debet kombo multifungsi dengan sistem *e-wallet*, serta

kartu *Automated Teller Machine* (ATM) tabunganku yang terintegrasi. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan beras dan/atau telur di e-warong BPNT (agen BRIlink). Apabila bantuan tidak dibelanjakan di bulan tersebut, maka nilai bantuan tetap tersimpan dan terakumulasi dalam akun elektronik bantuan pangan. (Pedoman Umum BPNT, Tahun 2016)

KPM BPNT adalah penduduk dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan. Program BPNT disalurkan melalui sistem perbankan yang dimaksudkan untuk mendukung perilaku produktif masyarakat melalui fleksibilitas waktu penarikan bantuan dan akumulasi aset melalui kesempatan menabung. Penggunaan sistem perbankan diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program serta memberikan kemudahan mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan. (Pedoman Umum BPNT, Tahun 2016)

Berkaitan dengan pelaksanaan Program BPNT telah terlaksana di Kota Palembang. Program BPNT terlaksana di 16 kecamatan di Kota Palembang dan mendapatkan respon positif dari masyarakat. Dinas Sosial Kota Palembang, Camat, dan Lurah yang bekerjasama dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)/Pendamping merupakan pihak yang ikut terlibat dalam penyaluran bantuan pangan kepada KPM di Kota Palembang. Berikut data jumlah KPM yang tersebar di 16 kecamatan di Kota Palembang.

Tabel 1.2. Penerima BPNT Kota Palembang Tahun 2017

No.	Kecamatan	Jumlah KPM	Penyaluran	No.	Kecamatan	Jumlah KPM	Penyaluran
1.	Alang-Alang Lebar	485	370	9.	Kemuning	540	376
2.	Bukit Kecil	500	371	10.	Kertapati	1.711	1.059
3.	Gandus	538	377	11.	Plaju	1.249	959
4.	Ilir Barat I	845	586	12.	Sako	420	303
5.	Ilir Barat II	1.003	678	13.	Seberang Ulu I	1.444	982
6.	Ilir Timur I	413	295	14.	Seberang Ulu II	1.072	750
7.	Ilir Timur II	903	551	15.	Sematang Borang	375	288
8.	Kalidoni	581	381	16.	Sukarami	1.010	749

Sumber : Dinas Sosial Kota Palembang pada Surat Kanwil BRI Palembang No. B.195/KW-IV/DJS

Pada tabel 1.2. diketahui bahwa penyaluran Kartu Kombo/KKS (alat pembayaran elektronik BPNT) berjalan dengan lambat, hal ini dapat dilihat dari jumlah KPM di 16 Kecamatan di Kota Palembang yang penyaluran Kartu Kombo tidak dapat mencapai 100% dalam setiap gelombang. Lambatnya penyaluran Kartu Kombo ini membuat pencairan bantuan pangan juga ikut terhambat untuk sampai ke tangan KPM. Penyaluran yang lambat disebabkan karena beberapa hal, salah satunya adalah karena dokumen persyaratan yang dimiliki masyarakat tidak lengkap.

DT-PFM adalah sumber data yang memuat Daftar Penerima Manfaat (DPM) yang merupakan hasil pemutakhiran Basis Data Terpadu di tahun 2015 dengan ditetapkan oleh Menteri Sosial. DPM diserahkan kepada Bank Penyalur dan Pemerintah Daerah oleh Kementerian Sosial, kemudian Bank Penyalur membukakan Rumah Rekening berdasarkan DPM. Rumah Rekening akan berubah menjadi Akun Elektronik Bantuan Pangan setelah

proses pendaftaran peserta selesai. Akun elektronik bantuan pangan diutamakan atas nama perempuan dalam keluarga, baik sebagai kepala keluarga atau pasangan kepala keluarga.

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), maka pemerintah menentukan tempat pembelian bahan pangan oleh KPM, yaitu di agen bank, pedagang, dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan Bank Penyalur/Himbara. Tempat pembelian yang dapat bekerja sama dengan Bank Penyalur diantaranya ialah pasar tradisional, warung, toko kelontong, Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama (E-warong KUBE), Warung Desa, Rumah Pangan Kita (RPK), Agen Laku Pandai, agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan, atau ucaha eceran lainnya. Tempat yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur akan menyiapkan bukti transaksi bantuan pangan yang dapat berupa cetak resi dari mesin pembaca alat pembayaran elektronik bantuan pangan, atau lainnya.

Program BPNT di Kota Palembang mengalami beberapa permasalahan, yaitu sosialisasi yang dilakukan dapat dikatakan belum maksimal, hal ini terlihat pada tidak tercapainya tujuan dan sasaran sosialisasi, yaitu masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui nama program yang mereka terima, masyarakat juga tidak paham ruang lingkup seputar bantuan pangan ini. Penyaluran kartu kombo/KKS ke KPM berjalan dengan lambat sehingga penyaluran bantuan ikut terhambat. Transfer dana bantuan pangan juga dilakukan dalam kurun waktu yang tidak menentu. Pada Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Pemerintah Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai dijelaskan bahwa dana bantuan ditransfer setiap satu bulan sekali, namun kondisi yang penulis temukan di lapangan adalah dana bantuan ditransfer lebih lama, yaitu 2 bulan sekali (dengan jumlah dana tidak di akumulasi). Permasalahan lainnya adalah banyak

Kartu Kombo milik masyarakat yang error, sehingga pada saat akan membeli bantuan di agen e-warong BPNT (agen BRIlink) akun saldonya tidak bisa digunakan sehingga tidak bisa mendapatkan bantuan pangan tersebut. Hal ini sangat berpengaruh terhadap efektivitas Program BPNT yang telah berjalan, oleh karena itu perlu diteliti lebih lanjut efektivitas Program BPNT di Kota Palembang.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Palembang?"

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai referensi yang dapat menunjang untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya untuk memperkaya ilmu di bidang Administrasi Negara.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Dinas Sosial Kota Palembang dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

DAFTAR PUSTAKA

Creswell, John W. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitaif dan Mixed. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Kusdi. 2009. *Teori Organisasi dan Administrasi.* Jakarta : Salemba Humanika

Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik.* Yogyakarta : UPP STIM YKPN

P. Siagian, Sondang. 2012. Teori Pengembangan Organisasi. Jakarta : Bumi Aksara

Pasolong, Harbani. 2016. *Teori Administrasi Publik.* Bandung : Alfabeta

Steers, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta : PPm. Erlangga

Subagyo, P. Joko. 2006. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta

Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Administrasi : Dilengkapi Metode R&D. Bandung : CV Alfabeta

Skripsi :

Pedro Harmoko (2010) Efektivitas Program Raskin di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Tahun 2009. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Kartika Febri Yuliani (2017) Efektivitas Program Pelayanan Kesehatan Gratis (P2KM) di Kota Bandarlampung

Haris (2010) Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Desa Pulo Dogom Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara Tahun 2010

Andi Azhar Mustafa (2015) Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) di Kota Makassar

Kartika Febri Yuliani (2017) Efektivitas Program Pelayanan Kesehatan Gratis (P2KM) di Kota Bandar Lampung

Andi Rizkiansyah (2017) Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kota Palembang

Sumber lain :

Peraturan Presiden No. 1 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Walikota Palembang Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

Peraturan Walikota Palembang Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Palembang

Peraturan Presiden No. 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Kemiskinan

Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Sumatera Selatan

Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai

Pedoman Umum EYD dan Pembentukan Istilah

Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Sriwijaya